

Strategi Peningkatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten Boalemo Berbasis Partisipasi Masyarakat

Ratih Ikawaty Hatu^{1*}, Dewinta Rizky Hatu², Rahmat Teguh Santoso Gobel³

^{1,2}Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, ³IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

*Corresponding email: ratihikawaty@ung.ac.id

ABSTRACT

The low growth of new entrepreneurs and the high open unemployment rate in Boalemo Regency have become critical issues that affect regional economic development and poverty levels. These challenges are primarily caused by the lack of training, mentoring, and optimal participatory planning, which hinders the confidence and initiative of prospective micro-entrepreneurs. This study uses secondary data obtained through literature review to analyze open unemployment projections based on age group, gender, and education level, as well as the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Boalemo Regency for 2025–2029. The GRDP projection indicates a positive economic trend across various sectors. However, unemployment is predicted to rise among the 35–44 and 55+ age groups. To address this, strategic recommendations are proposed by referring to the Regional Manpower Plan (RTKD) 2025–2029. The study emphasizes the importance of participatory planning through Musrenbang forums that involve micro-business actors. These forums aim to identify operational support needs, business development strategies, and entrepreneurship opportunities that can be translated into concrete programs funded by the regional budget (APBD), thereby encouraging the growth of micro enterprises and reducing unemployment.

Keywords: Open unemployment, participatory planning, MSMEs, Musrenbang.

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang sangat vital dan strategis dalam sistem perekonomian nasional. UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian rakyat, tetapi juga berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Dawam Rahardjo, 2002). Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di Indonesia sangat signifikan, menjadikannya sebagai pilar utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional (Arief Maulana, 2025).

Secara nasional, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup besar, di mana sektor perdagangan, hotel, dan restoran menyumbang sekitar 27%, disusul oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan sebesar 21%. Sektor jasa swasta, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan turut memberikan kontribusi yang sama besarnya. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan nasional per kapita seharusnya dimotori oleh program pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang salah satunya adalah melalui optimalisasi kinerja UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM harus mampu meningkatkan standar kinerjanya agar dapat berkontribusi secara lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Belinda Azzahra, 2021).

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro, yang mencakup pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Di Kabupaten Boalemo, upaya pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat UMKM merupakan bagian integral dari perekonomian nasional dan daerah, keberadaannya memiliki peran strategis dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pemerataan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan political will dari pemerintah daerah untuk secara serius memberdayakan sektor UMKM.

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki sebanyak 94.829 unit UMKM. Kabupaten Boalemo sendiri menyumbang 11.928 unit UMKM, menempati posisi kedua setelah Kabupaten Gorontalo. Namun, ironisnya, dari tahun ke tahun UMKM di Kabupaten Boalemo mengalami tren penurunan. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakmampuan UMKM bertahan dengan modal yang terbatas. Selain keterbatasan modal, permasalahan lain yang turut memengaruhi antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), lemahnya jaringan usaha, mentalitas pelaku usaha, kurangnya transparansi, iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, serta adanya pungutan liar. Tidak sedikit pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam mengakses informasi penting yang berkaitan dengan usaha mereka (Fibriyanti S. Lakoro, 2021).

Secara lebih spesifik, permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Boalemo antara lain: (1) rendahnya tingkat pertumbuhan wirausaha baru; (2) kurangnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap pelaku UMKM; (3) keterbatasan akses terhadap jaminan pinjaman; serta (4) rendahnya kualitas produk, khususnya dalam aspek kemasan (packaging).

Selain itu, tantangan besar lainnya adalah belum tersedianya fasilitas pelatihan usaha yang representatif di tingkat daerah. Hingga saat ini, Kabupaten Boalemo belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana strategis untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing pelaku usaha mikro. Ketiadaan BLK ini menghambat upaya peningkatan kualitas dan kompetensi pelaku UMKM dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif. Padahal, di tengah rendahnya tingkat pertumbuhan wirausaha baru, keberadaan BLK sangat penting untuk menjembatani kesenjangan keterampilan dan mendukung pengembangan usaha mikro secara produktif dan berkelanjutan.

Fokus penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, apa saja kendala dan permasalahan yang menghambat pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Boalemo dan bagaimana strategi peningkatan pertumbuhan usaha mikro yang efektif berbasis perencanaan partisipatif.

B. LANDASAN TEORI

Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah

Rencana pembangunan yang berlangsung tentu tidak terlepas dari perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif diartikan sebagai sebuah paradigma perencanaan pembangunan yang menekankan pelibatan seluruh unsur masyarakat dalam proses strategis dan manajemen pembangunan. Proses ini mencakup pertukaran informasi, interaksi, pengambilan keputusan bersama, dan inisiatif dari berbagai pihak (Khadijah, Kusumastuti, & Miladan, 2023).

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan memiliki signifikansi tersendiri karena dapat mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah serta meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan (Katrín Hofer, 2024). Beberapa tahapan di mana masyarakat dapat dilibatkan antara lain dalam penyusunan agenda, perancangan program, serta pelaksanaan dan evaluasi proyek pembangunan (Hofer & Kaufmann, 2013).

Salah satu bentuk implementasi nyata dari pendekatan partisipatif di Indonesia adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang merupakan forum terbuka lintas pemangku kepentingan. Musrenbang berfungsi

sebagai ruang untuk negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Kegiatan ini juga menjadi sarana penyesuaian antara aspirasi masyarakat dan kebijakan anggaran pemerintah (Saragih, Ritonga, & Harmain, 2022).

Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan UMKM

Sektor ekonomi, khususnya UMKM, merupakan indikator penting dalam mengukur kemakmuran suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang positif umumnya berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat (Setyari & Kusuma, 2021). UMKM tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan distribusi pendapatan (Simangunsong, 2022).

Dalam konteks pengembangan UMKM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pengembangan UMKM merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Upaya pengembangan tersebut meliputi pemberian bimbingan, pendampingan, bantuan teknis, serta penguatan daya saing UMKM melalui berbagai fasilitasi.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM menjadi elemen kunci keberhasilan kebijakan. Temuan Hasanah et al. (2022) menegaskan bahwa kebijakan daerah yang berpihak pada peluang ekonomi lokal dan berlandaskan pada nilai-nilai keberlanjutan mampu mendorong penguatan UMKM. Sementara itu, Elvina dan Musdalifah (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kesejahteraan sosial dibandingkan dengan faktor kebijakan maupun efektivitas program pembangunan lainnya. Hal ini mempertegas bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis UMKM.

Strategi Kolaboratif antara Pemerintah dan Masyarakat

Dalam praktiknya, pengembangan UMKM tidak bisa berjalan efektif tanpa adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Strategi kolaboratif dibutuhkan agar proses perencanaan pembangunan tidak bersifat top-down, melainkan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Kolaborasi ini mencakup penguatan kelembagaan lokal, penyediaan pelatihan keterampilan, fasilitasi akses pasar dan pembiayaan, serta pengembangan infrastruktur pendukung UMKM.

Upaya pemberdayaan UMKM melalui pendekatan partisipatif perlu dirancang dengan melibatkan komunitas lokal sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, program yang dijalankan menjadi lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan mampu menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan inklusif dan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka untuk menganalisis dan mensintesis literatur yang relevan terkait penerapan statistik deskriptif dalam penelitian. Penerapan statistik deskriptif harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan analisis data yang akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian. (Subhaktiyasa, N, Sumaryani, Sunita, & Syakur, 2025). Persiapan data mencakup pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam analisis. Studi pustaka dipilih karena sesuai untuk mengintegrasikan berbagai temuan dari literatur sebelumnya, sehingga dapat menyusun panduan praktis yang sistematis. Data Sekunder dikumpulkan dari berbagai jurnal, dokumen RTKD Kabupaten Boalemo, data Tingkat Pengangguran Terbuka, untuk mendukung kebijakan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Boalemo. Penerapan statistik deskriptif dilakukan secara sistematis untuk memastikan analisis data yang akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala dan Permasalahan Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Boalemo

Selang tahun 2018-2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Boalemo menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana pada tahun 2018 TPT Kabupaten Boalemo berada pada angka 3,62 persen menurun sebanyak 0,76 persen menjadi 2,86 persen pada tahun 2023, penurunan angka TPT paling rendah (membaik) terjadi pada tahun 2022 yaitu berada pada angka 2,07 persen, sementara kenaikan TPT paling tinggi terjadi pada tahun 2020 berada pada angka 3,66 persen hal ini diakibatkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaannya mengingat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kontak langsung antara manusia. (BAPPEDA Boalemo, 2024)

Data mengenai pengangguran terbuka di Kabupaten Boalemo menunjukkan tren yang bervariasi untuk setiap kelompok umur selama periode 2025-2029.

Kelompok usia 15-24 tahun mengalami penurunan jumlah pengangguran terbuka secara signifikan, dari 449 orang pada 2025 menjadi -102 orang pada 2029, yang berarti telah terjadi penyerapan tenaga kerja yang lebih baik di kelompok ini. Sementara itu, kelompok usia 25-34 tahun juga mengalami fluktuasi, dengan jumlah pengangguran berkurang pada tahun-tahun tertentu, tetapi menunjukkan angka negatif (indikasi surplus tenaga kerja atau kondisi lapangan kerja yang membaik) pada 2025 dan kembali mengalami penurunan pengangguran secara signifikan hingga -452 orang pada 2029 (BAPPEDA Boalemo, 2024).

Tabel I. Perkiraan Pengangguran terbuka Kab. Boalemo 2025-2029.

Umur	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
15-24	449	414	297	110	-102
25-34	-507	189	-14	-221	-452
35-44	128	686	1.302	1.933	2.559
45-54	-413	-241	-116	-33	30
55+	-473	-26	468	1.010	1.610
Total	-817	1.022	1.936	2.799	3.645

Sumber: dokumen RTKD Kab. Boalemo, 2024.

Di sisi lain, kelompok usia yang lebih tua, terutama 35-44 tahun dan 55 tahun ke atas, menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka. Kelompok usia 35-44 tahun mencatat kenaikan yang cukup tajam, dari 128 orang pada 2025 menjadi 2.559 orang pada 2029, menunjukkan adanya kesulitan dalam penyerapan tenaga kerja di usia produktif tersebut. Begitu pula dengan kelompok usia 55 tahun ke atas, yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran terbuka, dari -473 orang pada 2025 menjadi 1.610 orang pada 2029. Sementara itu, kelompok usia 45-54 tahun cenderung stabil dengan fluktuasi kecil, dan mulai menunjukkan sedikit peningkatan pengangguran pada akhir periode. Secara keseluruhan, tren total pengangguran terbuka di Kabupaten Boalemo meningkat dari -817 pada 2025 menjadi 3.645 pada 2029, mengindikasikan perlunya kebijakan intervensi yang efektif untuk menanggulangi pengangguran di berbagai kelompok umur, terutama di kelompok usia produktif dan lanjut usia.

Perkiraan pengangguran terbuka di Kabupaten Boalemo berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan tren yang bervariasi selama periode 2025-2029. Pada tingkat pendidikan maksimum SD, angka pengangguran mengalami kenaikan signifikan, dari -522 pada tahun 2025 (artinya penurunan jumlah pengangguran) hingga mencapai 2.455 pada tahun 2029. Kenaikan ini mengindikasikan adanya

peningkatan jumlah pencari kerja yang tidak dapat terserap di pasar kerja, terutama bagi mereka dengan tingkat pendidikan rendah. Sementara itu, untuk lulusan SMP, pengangguran terbuka justru menunjukkan tren penurunan selama periode yang sama, dengan angka terus menurun dari -209 pada tahun 2025 menjadi -561 pada tahun 2029. Di sisi lain, pengangguran untuk tingkat pendidikan SMA ke atas menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, dari -86 pada tahun 2025 menjadi 1.750 pada tahun 2029. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, peluang kerja bagi lulusan SMA ke atas mungkin tidak tumbuh sebanding dengan jumlah lulusan yang memasuki pasar kerja, sehingga mengakibatkan kenaikan pengangguran terbuka di kalangan tersebut.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Boalemo

Selama periode 2025-2029, kesempatan kerja di Kabupaten Boalemo menunjukkan adanya pergeseran dalam berbagai status pekerjaan. Pekerja di sektor informal, seperti pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian, diperkirakan mengalami peningkatan signifikan. Pekerja bebas di pertanian diproyeksikan naik dari 9.510 orang pada tahun 2025 menjadi 13.088 orang pada tahun 2029. Demikian pula, pekerja bebas di non-pertanian meningkat dari 4.634 menjadi 5.373 orang selama periode yang sama. Tren ini menunjukkan peningkatan proporsi tenaga kerja yang mengandalkan pekerjaan tidak tetap atau informal sebagai sumber penghasilan utama.

Tabel 2 . proyeksi kesempatan kerja Kab. Boalemo 2025-2029.

Status Pekerjaan	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Berusaha sendiri	25.118	27.023	28.928	30.833	32.738
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	11.812	10.245	8.678	7.112	5.545
Berusaha dibantu	1.876	2.013	2.150	2.287	2.424
Pekerja bebas di pertanian	9.510	10.404	11.299	12.193	13.088
Pekerja bebas di non pertanian	4.634	4.819	5.004	5.188	5.373

Sumber: dokumen RTKD Kab. Boalemo, 2024.

Jumlah pekerja yang berusaha sendiri diperkirakan akan terus meningkat, dari 25.118 orang pada tahun 2025 menjadi 32.738 orang pada tahun 2029, mencerminkan adanya semangat kewirausahaan di tengah masyarakat. Selama periode 2025-2029, tenaga usaha tani, kebun, ternak, ikan, hutan, dan perburuan tetap menjadi penyumbang terbesar dalam kesempatan kerja di Kabupaten

**Strategi Peningkatan Pertumbuhan Usaha Mikro
Kabupaten Boalemo Berbasis Partisipasi Masyarakat**
Ratih Ikawaty Hatu, Dewinta Rizky Hatu, Rahmat Teguh Santoso Gobel.

Boalemo. Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja di sektor ini tercatat sebesar 41.136 orang, dan diproyeksikan meningkat menjadi 46.326 orang pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah, meskipun kontribusinya relatif mungkin akan mengalami perubahan seiring berkembangnya sektor lain.

Tabel 3. proyeksi kesempatan kerja Kab. Boalemo 2025-2029.

Jabatan	2025	2026	2027	2028	2029
Tenaga usaha penjualan	12.480	13.223	13.920	14.578	15.204
Tenaga usaha jasa	2.415	1.816	1.364	1.025	769
Tenaga usaha tani, kebun, ternak, ikan, hutan dan perburuan	41.136	42.580	43.911	45.153	46.326
Tenaga produksi operator angkutan dan pekerja kasar dan lainnya	16.167	14.865	13.589	12.351	11.154

Sumber: dokumen RTKD Kab. Boalemo, 2024.

Sementara itu, tenaga usaha penjualan juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan jumlah tenaga kerja yang naik dari 12.480 orang pada tahun 2025 menjadi 15.204 orang pada tahun 2029. Sebaliknya, jumlah tenaga kerja di sektor usaha jasa dan tenaga produksi, operator angkutan, serta pekerja kasar cenderung menurun. Pada tahun 2025, tenaga usaha jasa tercatat sebanyak 2.415 orang dan diperkirakan turun menjadi 769 orang pada tahun 2029. Penurunan ini dapat disebabkan oleh perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja atau penurunan permintaan terhadap layanan tertentu.

Table 4. proyeksi tingkat partisipasi angkatan kerja Kab. Boalemo

Umur	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
15-24	29.267	30.541	30.930	31.012	27.485
25-34	28.000	27.718	28.408	28.818	25.403
35-44	24.371	24.227	24.763	25.051	21.913
45-54	19.190	19.641	20.324	20.816	18.993
55+	19.321	20.100	21.257	22.245	20.571
Total	120.149	122.227	125.682	127.942	114.365

Sumber: dokumen RTKD Kab. Boalemo, 2024.

Semakin tinggi golongan umur, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan pola yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Pada kelompok usia muda (15–24 tahun), partisipasi angkatan kerja diperkirakan masih cenderung rendah, yang dapat dilihat dari angka penduduk usia kerja yang mencapai 29,267 ribu pada tahun 2019 dan sedikit meningkat hingga 31,012 ribu pada tahun 2022, sebelum turun drastis menjadi 27,485 ribu pada tahun 2023. Kelompok usia produktif (25-54 tahun) menunjukkan partisipasi angkatan kerja yang lebih stabil dan tinggi, dengan jumlah penduduk usia kerja mencapai puncaknya pada kelompok usia 25-34 tahun sebesar 28,818 ribu pada 2022, meskipun kemudian turun menjadi 25,403 ribu pada 2023. Di usia 35-44 tahun, jumlahnya mencapai 25,051 ribu pada 2022, dan 21,913 ribu pada 2023. Partisipasi tetap signifikan pada kelompok usia 45-54 tahun, dengan jumlah 20,816 ribu pada 2022 dan sedikit menurun menjadi 18,993 ribu pada 2023. Kelompok usia 55 tahun ke atas juga menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 22,245 ribu pada 2022, sebelum sedikit menurun menjadi 20,571 ribu pada 2023.

Strategi Peningkatan Usaha Mikro Berbasis Perencanaan Partisipatif

Salah satu bentuk dalam pemberdayaan yang ada di Indonesia adalah pemberdayaan UMKM yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah sehingga juga dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, yang mana dampak tersebut dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. (Putra A. C., 2022). Dari Penelitian tersebut disimpulkan bahwa UMKM memiliki kontribusi terhadap perekonomian dalam sebuah daerah. Pada penelitian sebelumnya juga diperoleh bahwa variabel dampak UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pengangguran. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang baik, sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97%. Upaya untuk mengembangkan sektor UMKM dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang terlibat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan (Husniyah, Basyah, & Mustofa, 2022). Potensi pengangguran terbuka tersebut perlu diseriusi dengan mendorong masyarakat untuk berinisiatif mencari keuntungan di bidang usaha mikro. Tanggung jawab pemerintah daerah harus melakukan kebijakan yang afirmatif

sesuai kebutuhan usaha mikro. Tentu pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sudah memiliki peta kebutuhan yang mesti berangkat dari aspirasi dan kebutuhan usaha mikro. Pelaku usaha mikro di Kabupaten Boalemo, memerlukan banyak bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan berbagai usaha secara mandiri. Pelaku usaha mikro umumnya terkendala masalah utama kurangnya pengembangan usaha. Masalah keterampilan menjadi kekuaran terbesar sehingga patut diintervensi melalui pelatihan-pelatihan yang bisa dijangkau karena mengingat jika pelatihan kurang didapatkan sangat berpengaruh pada kreasi dan promosi yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha mikro. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Boalemo jika pelaku usaha mendapatkan dukungan pelatihan yang maksimal.

Pada hasil analisis model dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) jumlah unit usaha UKM serta PDRB mempunyai kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Jumlah unit UMKM, PDB UMKM dan investasi secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. (Tasyim, Kawung, & Siwu, 2021) Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Widdyantoro (2013), yang mengemukakan bahwa secara simultan PDB UKM, investasi UKM, dan jumlah unit usaha UKM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2011 pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman telah menandatangani sebuah nota kesepahaman untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan UMKM di Indonesia yang bertujuan agar dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dan UMKM yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kolaborasi antar kementerian sangat diperlukan, karena masing-masing kementerian memiliki sumber daya dan program yang dapat disinergikan untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai tahap awal, akan ada pelatihan kewirausahaan masif yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia mulai Mei 2025. Maman Abdurrahman juga menambahkan bahwa kerja sama pelatihan wirausaha ini menargetkan sekitar 5.000 peserta dari usaha mikro dan kecil, dengan kemungkinan jumlah peserta bisa mencapai 10.000 orang. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini akan memanfaatkan fasilitas balai-balai yang dimiliki Kemnaker, dan merupakan kolaborasi yang sangat positif untuk mempercepat pertumbuhan UMKM di Indonesia.(Kemenaker, 2025).

Momentum ini menjadi agenda penting untuk menyelaraskan program pemberdayaan usaha mikro di kabupaten Boalemo. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan keseriusan pemerintah daerah untuk membentuk Balai Latihan Kerja yang dukungan anggarannya bisa mendapatkan hibah dari Kemenaker dan intervensi APBD Boalemo. Olehnya, program nasional dalam menggerakan pelatihan massif kepada usaha mikro dapat dilaksanakan secara optimal di Kabupaten Boalemo. Peraturan dan kebijakan pemerintah daerah juga memengaruhi usaha mikro. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha mikro, seperti fasilitasi akses ke permodalan dan pelatihan, penyediaaan pelatihan keterampilan dan kebijakan birokrasi yang *bottom-up* dapat memberikan dampak positif pada kinerja usaha mikro. Di sisi lain, pengambilan kebijakan yang tidak partisipatif dapat menjadi hambatan bagi kemajuan usaha mikro, bahkan jika mereka memiliki modal yang cukup. (Said Moh. Agus B. Bakari, 2024). Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non- pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan termasuk anggarannya. (Saragih, Ritonga, & Harmain, 2022). Selain itu, perlu dipetakan potensi usaha mikro yang perlu diintervensi guna menumbuhkan jumlah usaha mikro di daerah. Hal ini penting untuk dilakukan karena selama ini usaha mikro yang berbasis pada kebutuhan masyarakat akan sangat mempengaruhi daya saing dan pemasaran. Sebab menurunya usaha mikro di Kabupaten Boalemo sangat dipengaruhi oleh produk yang dijual dan kebutuhan dana yang menjadi operasional para pelaku usaha mikro. Olehnya pada saat Musrenbang sudah ada stimulus program usaha mikro yang dapat diberikan kepada masyarakat yang berkeinginan menjadi pelaku usaha mikro. Lazimnya perencanaan partisipatif memberi garansi terhadap aspirasi masyarakat yang diusulkan pada musrenbang partisipatif dapat memperoleh kepastian penganggaran daerah.

E. KESIMPULAN

Perkiraan Pengangguran terbuka Kabupaten Boalemo tahun 2025-2029 menurut Golongan Umur dengan total 3.645 orang. Kelompok usia yang lebih

tua, terutama 35-44 tahun dan 55 tahun ke atas, menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka. Dengan potensi pengangguran terbuka tersebut, maka pemerintah daerah perlu ada perencanaan partisipatif yang bisa menjangkau keinginan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan pertumbuhan usaha mikro di kabupaten boalemo. Perencanaan partisipatif dikongkretkan melalui kegiatan Musrenbang yang massif kepada pelaku usaha mikro untuk mengidentifikasi kebutuhan dukungan operasional, trik membuka usaha baru, pengembangan usaha sehingga bisa dikonversi menjadi program yang sumber pendanaannya melalui APBD Kabupaten Boalemo. Selain itu juga diperlukan stimulus program melalui peningkatan pelatihan keterampilan kepada usaha mikro yang sudah ada dengan menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah menjadi program nasional untuk pelatihan kewirausahaan serentak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo. (2024). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Kabupaten Boalemo.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo. (2024). Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Boalemo 2025-2049 Kabupaten Boalemo.
- Belinda Azzahra, et.al. (2021). Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045. *Inspire Journal Economics and Development Analysis*. 1 (1).
- Dawam Rahardjo. (2002). Islam dan Transformasi Budaya. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Fibriyanti S. Lakoro, Sukrianto. (2021). Literasi Dan Model Manajemen Keuangan Umkm Berbasis Digital Pada Umkm-Umkm Di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 5 (2).
- Husniyah, A., Basyah, N. A., & Mustofa, A. (2022). Dampak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Sibolga. *Economica Didactica*, Vol. 2 No.I: 1-14.
- Hofer, K., & Kaufmann, D. (2013). Actors, arenas and aims: A conceptual framework for public participation. *Planning Theory*, 22 (4), 357-379.
- Isti Nurul Sakinah et.al, (2022). Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus di Kecamatan Tilango), *Jurnal Governance* 2, (1).
- Katrin Hofer, M. W. (2024). public Support for Participation in Local Development. *World Development*, 1-15.

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kumperindag Kabupaten Boalemo Tahun 2024.
- Lies Maria Hamzah, et.al. (2023). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal JEP*, 8.
- Kemenaker, (2025). Kemnaker-KemenUMKM Sinergi UMKM Sejahterakan Tenaga Kerja, lihat : <https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-kemenumkm-sinergi-umkm-sejahterakan-tenaga-kerja>, diakses pada tanggal 10 April 2025.
- Rosma Simangunsong, Pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal WIPPUN*, I (1).
- Said Moh. Agus B. Bakari et.al. (2024). Determinan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), *Gorontalo Development Review*, 7 (1).
- Setyari, N. P. W. dan W. G. A. Kusuma. 2021. Economics and Environmental Develop-ment: Testing the Environmental Kuz-nets Curve Hypothesis. International Journal of Energy Economics and Policy 11(4): 51-58. <https://doi.org/10.32479/ijep.11156>.
- Putra, T. G. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Kebijakan dan Manjemen Publik*, Vol 3: 1-10.
- Hasanah, B., Sururi, A., Pranada, D. P., & Noval, A. M. (2022). Social Entrepeneurship: Citizen Participation and Evaluation of Socio-Economic Impact. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 28: 291-317.
- Elvina, & Musdalifah. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *JSHP*, Vol. 3, No. 1: 1-9.
- Khadijah, S., Kusumastuti, & Miladan, N. (2023). Kesesuaian proses perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Triharjo, Kabupaten Kulon Progo. *Region Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Vo. 19. No. 2: 372-395.
- Saragih, J. R., Ritonga, N. K., & Harmain, U. (2022). Efektivitas perencanaan partisipatif dan perancangan model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. *Region Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Vol. 17 No. 2: 317-330 .
- Subhaktiyasa, P. G., N. S. A., Sumaryani, P., Sunita, N. W., & Syakur, A. (2025). Penerapan Statistik Deskriptif: Perspektif Kuantitatif dan Kualitatif. *Emasains Jurnal Edukasi Matematika dan Sains* , Vol. 14. No. 1: 96-104.
- Putra, A. C. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pdrb Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Surabaya . *Jurnal Lemhanas RI* , Vol. 10 No. 2: 134-148.
- Tasyim, D. A., Kawung, G. M., & Siwu, H. F. (2021). Pengaruh Jumlah Unit Usaha Umkm Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 391-400.